



**PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN**



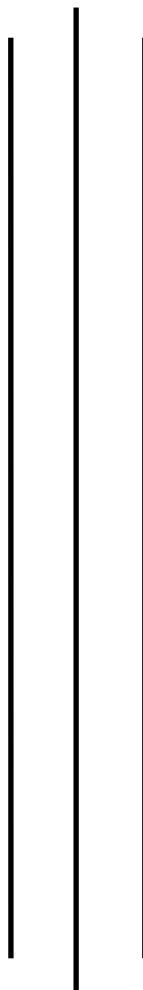
RENCANA KERJA TAHUN 2025



DPMPTSP

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Dokumen ini merupakan implementasi Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Renja DPMPTSP ini, dijabarkan berbagai rencana program dan kegiatan yang telah disesuaikan guna mengakomodir tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah, berdasarkan Renstra OPD serta hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2023.

Semoga rencana kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan di dalam pencapaian kinerja perangkat daerah.

Sragen, 28 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN



DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19791225 199810 1 00



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. dr. Soetomo No.5 Telp.0271-892348 (hunting), Fax 0271-894433
Website <http://dpmtsp.sragenkab.go.id/>, E-mail dpmtsp@sragenkab.go.id

S R A G E N - 57213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 000.7.2.4/1053/18/2024

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN
SRAGEN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15);
 9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 63);
 10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 6).
 11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2025; (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN



DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
KATA PENGANTAR	ii	
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUN 2025	iii	
DAFTAR ISI	vii	
DAFTAR TABEL	viii	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	1	
1.2. Landasan Hukum	4	
1.3 Maksud dan Tujuan	7	
1.4 Sistematika	7	
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU		
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022	8	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	15	
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	19	
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23	
2.5. Penelaahan Usulan dan Program/ Kegiatan Masyarakat...	34	
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN		
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	35	
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	37	
3.3. Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	38	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		41
4.1 Rencana Program Strategis Daerah Tahun 2024	42	
4.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2024	42	
BAB V PENUTUP		66

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1	Bagan Alur Renja SKPD	3
Gambar 1.2	Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah	3
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra	10
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Pelayanan	18
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
Tabel 2.3	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	34
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP	38
Tabel 3.2	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024	39
Tabel 4.1	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Sragen	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

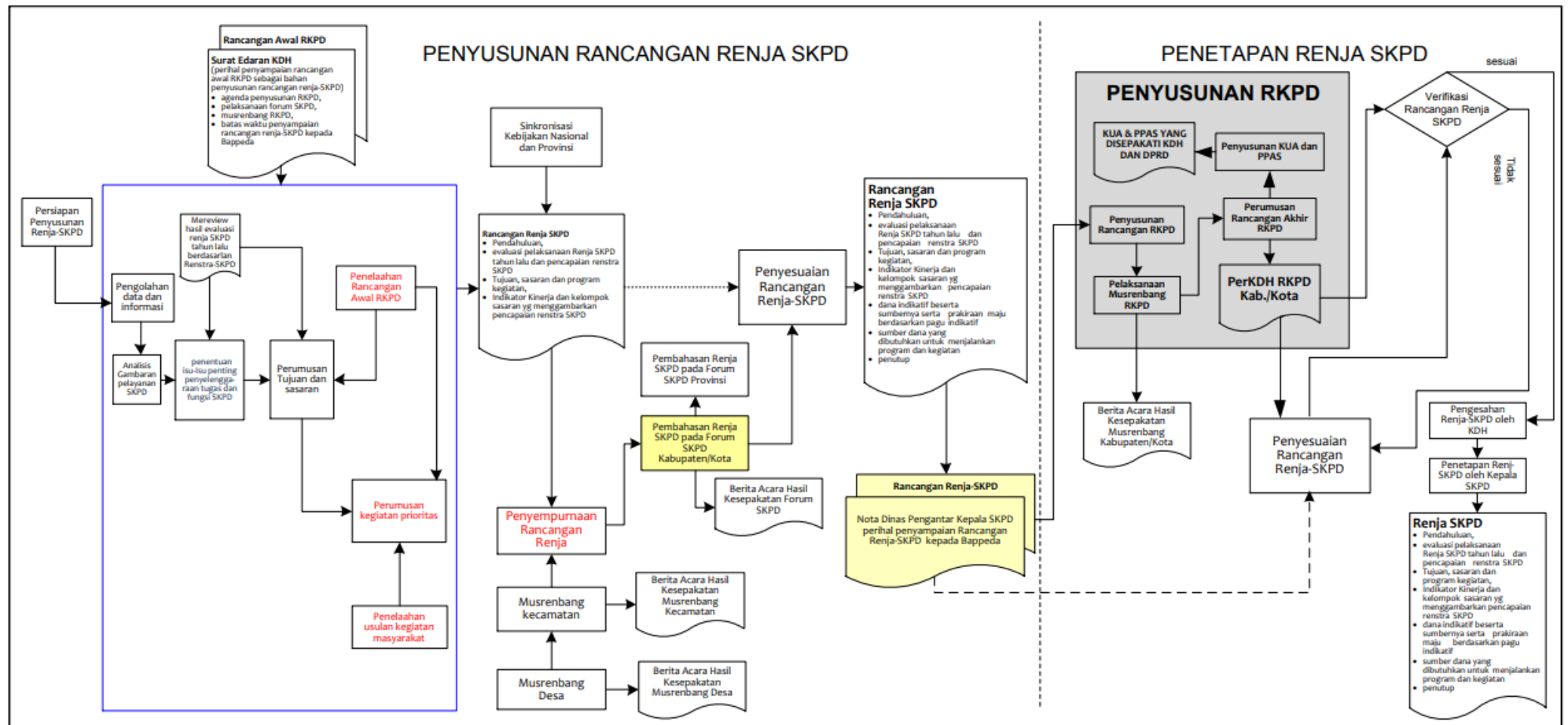
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Tahun 2025 adalah tahun pertama periode RPJMD Bupati terpilih, maka penyusunan renja sebagai dokumen perencanaan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2025. Renja ini memuat program dan kegiatan sebagai pedoman untuk memberikan arah-arrah pedoman terhadap semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025. Penyusunan Renja SKPD mengacu pada kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja Tahun 2023.

Prinsip Penyusunan:

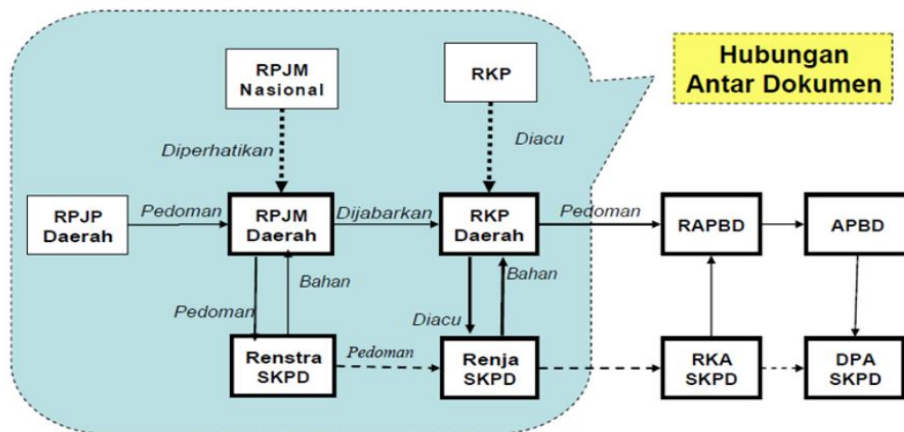
1. Substansi rencana kerja menyesuaikan dengan Renstra tahun 2021-2026.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan berdasarkan Renstra tahun 2021-2026.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.

4. Rencana Kerja merupakan dokumen program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana.



Gambar 1.1
 Bagan alur penyusunan Renja

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. maka seluruh tahapan penyusunan rencana kerja dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.2

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2.Landasan Hukum

Penyusunan Renja tahun 2025 didasarkan pada :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata Cara Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- k. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- l. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi. dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;

- w. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
- x. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
- y. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Renja tahun 2025 dimaksudkan ;

1. Untuk memberikan arahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2025 yang akan dibiayai dengan APBD dan sumber-sumber biaya lainnya.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama tahun 2025 yang mencakup rencana capaian kinerja, untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
3. Sebagai acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pada pelaksanaan Pembangunan Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja DPMPSTSP Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah ;

1. Sebagai landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Menguraikan secara strategis tahapan target yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan, berdasarkan isu-isu aktual/ strategis yang dihadapi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Sepanjang tahun 2023, pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan, yaitu :

- a. Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2023 dapat dilihat di bawah ini

No.	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	Target	Capaian	%
1	Nilai realisasi penanaman modal	trilyun rupiah	1.55	2.2	142
2	Jumlah PMA PMDN	investor	1.313	14.936	1.137

Capaian indikator kinerja urusan Penanaman Modal tersebut didukung capaian kinerja 6 indikator program yang dapat dilihat pada tabel berikut;

Program	Indikator	Target	Capaian	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase ketercapaian pelayanan umum.	100	100	100

DAERAH KABUPATEN/KOTA	kepegawaian. dan keuangan Perangkat Daerah [%]			
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]	40	30	75
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/ besar [%]	20	39,29	196,45
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]	83.00	87.50	105.42
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]	10	58,42	584,20
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]	30	30	100

Realisasi program yang tidak memenuhi target 100% pada indikator **Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun** sedangkan indikator lainnya telah mencapai/ melebihi 100%.

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten Sragen

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen

Periode Pelaksanaan : Tahun 2023

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Faktor
1	Nilai realisasi penanaman modal	Rp trilyun	1,55	2,2	[Pendorong] Kemudahan perizinan berusaha
2	Jumlah PMA PMDN	investor	1313	14936	[Pendorong] kemudahan perizinan berusaha

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja sd Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Faktor	Tinjut/ Rekomendasi
						IV					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)						193,51	96,83				
Rata-rata capaian kinerja OPD by Kegiatan (%)						109,81					
Rata-rata capaian kinerja OPD by Sub Kegiatan (%)						110,43					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.199.517.208		6.977.821.295		96,92		
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			7.199.517.208		6.977.821.295		96,92		
2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]	100	5.880.965.608	100	5.671.801.188	100	96,44		
2.18.01.2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]	4	3.783.000	4	3.280.000	100	86,70		
2.18.01.2,01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [Laporan]	1	3.783.000	1	3.280.000	100	86,70	[TW3 - Penghambat] Kegiatan fisik sudah direalisasi [TW4 - Pendorong] Proses SPJ	[TW4] proses SPJ [Rekom Berikutnya] Selesai

2.18.01.2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah [bulan]	12	3.094.473.000	12	3.006.566.236	100	97,16		
2.18.01.2,02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Org/bln]	25	3.094.473.000	24	3.006.566.236	96	97,16		
2.18.01.2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]	1	76.900.000	2	68.231.000	200	88,73		
2.18.01.2,05.02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan [Paket]	34	30.685.000	31	27.430.000	91,18	89,39		
2.18.01.2,05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	40	46.215.000	40	40.801.000	100	88,29	[TW1 - Penghambat] Rencana kegiatan dilaksanakan pada TW III [TW2 - Penghambat] Rencana kegiatan dilaksanakan pada TW III [TW3 - Penghambat] rencana pelaksanaan di TW 4..	[TW2] [TW3] Pelaksanaan pada TW III [TW4] pelaksanaan di TW 4 [Rekom Berikutnya] Selesai
2.18.01.2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]	12	982.290.620	12	940.405.897	100	95,74		
2.18.01.2,06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	4	42.108.000	6	40.262.600	150	95,62	[TW4 - Penghambat] Penyelesaian SPJ	[Rekom Berikutnya] Penyelesaian SPJ
2.18.01.2,06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	8	631.275.620	11	606.172.000	137,50	96,02		
2.18.01.2,06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	4	64.350.000	4	55.524.000	100	86,28		
2.18.01.2,06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	4	105.865.000	2	104.137.300	50	98,37		
2.18.01.2,06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	1	7.992.000	1	3.660.000	100	45,80	[TW4 - Penghambat] Penyelesaian SPJ	[Rekom Berikutnya] -
2.18.01.2,06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	35	115.100.000	37	115.099.997	105,71	100		
2.18.01.2,06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	1	15.600.000	1	15.550.000	100	99,68		

2.18.01.2,06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [Dokumen]	1	0	0	0	0	0		
2.18.01.2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]	2	349.571.000	3	345.111.000	150	98,72		
2.18.01.2,07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	1	33.815.000	1	33.470.000	100	98,98	[TW4 - Penghambat] administrasi peng SPJ an	[Rekom Berikutnya] realisasi (pencairan)
2.18.01.2,07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	6	229.215.000	9	225.478.000	150	98,37		
2.18.01.2,07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	15	86.541.000	15	86.163.000	100	99,56		
2.18.01.2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	12	1.024.807.298	12	993.363.785	100	96,93		
2.18.01.2,08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	4	5.500.000	4	5.100.000	100	92,73	[TW4 - Penghambat] penyelesai an SPJ	[Rekom Berikutnya] -
2.18.01.2,08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	4	433.436.000	4	421.642.749	100	97,28		
2.18.01.2,08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	4	94.798.298	4	87.494.000	100	92,29		
2.18.01.2,08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	4	491.073.000	4	479.127.036	100	97,57		
2.18.01.2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	6	349.140.690	6	314.843.270	100	90,18		
2.18.01.2,09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	3	55.750.000	3	52.077.753	100	93,41		
2.18.01.2,09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	12	109.789.409	12	97.545.517	100	88,85		
2.18.01.2,09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	56	18.521.000	69	17.949.000	123,21	96,91	[TW4 - Penghambat] pengajuan SPJ	[Rekom Berikutnya] -
2.18.01.2,09.07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	3	20.850.000	1	9.675.000	33,33	46,40		
2.18.01.2,09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	1	88.286.880	1	87.392.500	100	98,99		
2.18.01.2,09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	57	55.943.401	51	50.203.500	89,47	89,74		
Rata-rata capaian kinerja (%)						100	96,33	100	96,44		
Predikat kinerja						ST	ST	ST	ST		

2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]	40	211.237.000	30	210.055.900	75	99,44		
2.18.02.2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah penyusunan peta potensi investasi [dokumen]	2	211.237.000	2	210.055.900	100	99,44		
2.18.02.2,02.01		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota [Dokumen]	1	88.839.000	1	87.903.500	100	98,95	[TW4 - Penghambat]	[Rekom Berikutnya] Penyelesaian (pencairan)
2.18.02.2,02.02		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota [Dokumen]	1	122.398.000	1	122.152.400	100	99,80		
Rata-rata capaian kinerja (%)						75	99,44	75	99,44		
Predikat kinerja						S	ST	S	ST		
2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]	20	134.104.100	39,29	132.038.744	196,45	98,46		
2.18.03.2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi [kali]	2	134.104.100	2	132.038.744	100	98,46		
2.18.03.2,01.02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	2	134.104.100	2	132.038.744	100	98,46		
Rata-rata capaian kinerja (%)						196,45	98,46	196,45	98,46		
Predikat kinerja						STS	ST	STS	ST		
2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [point]	83	482.718.500	87,50	478.235.963	105,42	99,07		
2.18.04.2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]	100	482.718.500	100	478.235.963	100	99,07		
2.18.04.2,01.01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [Pelaku Usaha]	1.200	131.252.000	2.415	129.542.863	201,25	98,70		
2.18.04.2,01.02		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha]	500	216.033.000	1.056	215.039.000	211,20	99,54		
2.18.04.2,01.03		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan [Orang]	90	38.356.500	200	37.646.500	222,22	98,15		
2.18.04.2,01.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	150	97.077.000	210	96.007.600	140	98,90		
Rata-rata capaian kinerja (%)						105,42	99,07	105,42	99,07		
Predikat kinerja						STS	ST	STS	ST		

2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]	10	386.000.000	58,42	384.239.500	584,20	99,54		
2.18.05.2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]	100	386.000.000	67,70	384.239.500	67,70	99,54		
2.18.05.2,01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha]	60	0	0	0	0	0		
2.18.05.2,01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal [Pelaku Usaha]	375	292.000.000	375	290.239.500	100	99,40		
2.18.05.2,01.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	100	94.000.000	164	94.000.000	164	100		
Rata-rata capaian kinerja (%)						584,20	99,54	584,20	99,54		
Predikat kinerja						STS	ST	STS	ST		
2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]	30	104.492.000	30	101.450.000	100	97,09		
2.18.06.2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]	30	104.492.000	30	101.450.000	100	97,09		
2.18.06.2,01.01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	1	104.492.000	1	101.450.000	100	97,09		
Rata-rata capaian kinerja (%)						100	97,09				
Predikat kinerja						ST	ST				

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan terpadu. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis telah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2023, kinerja DPMPTSP Kabupten Sragen dapat digunakan untuk mengukur/memperkirakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2025. Adapun capaian indikator pada tahun 2023 berdasarkan target renstra dapat dijelaskan bahwa upaya peningkatan realisasi nilai investasi dan jumlah PMA/PMDN (investor) yang menanamkan modal dilakukan melalui penyusunan kebijakan penanaman modal, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan dan pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan nonperizinan. Dengan peningkatan kinerja program tersebut di atas diharapkan jumlah realisasi investasi dan jumlah PMA/PMDN semakin meningkat dari tahun ke tahun. Target nilai investasi tahun 2023 adalah 1.55 trilyun dengan capaian sebesar 2.2 trilyun rupiah, sedangkan jumlah PMA/PMDN (investor) sebanyak 14.936 dari target sebanyak 1.313 investor.

Beberapa indikator kinerja yang telah dicapai antara lain;

1. Persentase penyusunan kebijakan penanaman modal tercapai tahun 2023 sebesar **75%**, dimana jumlah dokumen kebijakan penanaman modal yang dihasilkan pada tahu 2023 sebanyak **2** dokumen. Secara kumulatif sejak tahun 2022-2023, telah dihasilkan 3 dokumen kebijakan penanaman modal dari target 10 dokumen sampai dengan akhir tahun renstra. Dengan demikian di tahun 2023 persentase dokumen yang dihasilkan sebanyak 30% dari target yang ditetapkan sebesar 40%. Sehingga persentase pencapaian indikator dokumen kebijakan penanaman modal yang disusun sampai dengan tahun 2023 sebesar **75%**.
2. Persentase realisasi kepeminatan calon investor sebesar **39,29%** dari target **20%** di tahun 2023. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator Persentase realisasi kepeminatan sebesar **196,45%**. Hal ini didukung oleh kegiatan promosi yag dilakukan baik melalui pameran investasi maupun diseminasi informasi penanaman modal.

3. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditujukan kepada pengguna layanan/ pelaku usaha, dimana hasil dari penilaian akan menjadi tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan perizinan oleh aparat pemerintah, khususnya aparat pelayanan perizinan dan nonperizinan. Hasil pelaksanaan survei tahun 2023 adalah **87.50** dari target **83.00 (105,42%)**.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung pencapaian IKM antara lain:

- a. Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko/ *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA), maka aplikasi OSS RBA digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan yang berbentuk badan usaha maupun perorangan, usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun yang terdapat komposisi modal asing. Manfaat Penggunaan OSS RBA antara lain;
- Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi. Lingkungan, dan bangunan), izin usaha. maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
 - Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*.
 - Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
 - Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).
- b. Pemanfaatan aplikasi perizinan *online* dengan nama Sistem Perizinan *Online* Sragen (SI PIONER). Aplikasi SI PIONER digunakan untuk pelayanan perizinan selain yang tercantum dalam kewenangan OSS RBA. Diharapkan pula semua jenis layanan yang menjadi kewenangan DPMPTSP yang tidak diakomodasi dalam OSS RBA. dapat dilayani melalui SI PIONER.

4. Pada indikator **Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM** tahun 2023 mencapai 58,42 % dari target 10% dengan tingkat capaian sebesar 584,20% jauh melebihi ekspektasi. Tingginya tingkat capaian kinerja pada indikator ini karena kemudahan dalam pelaporan serta *masifnya* pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis bagi pelaku usaha terhadap ketentuan bidang penanaman modal, yang didalamnya terdapat pendampingan dalam menyusun LKPM.
5. Pada Indikator **persentase laporan pelayanan perizinan dan non perizinan yang tersusun dengan baik** tahun 2023 telah mencapai 30 % dari target 30% dengan tingkat capaian sebesar 100%. Tingkat capaian kinerja pada indikator ini didukung oleh sistem palikasi yang tersedia antara OSS RBA, SIPINER, SIPIPO, SIMBG dan lain-lain. Selain itu dengan adanya integrasi sistem yang ada di Mal Pelayanan Publik sangat membantu dalam penyusunan laporan perizinan dan nonperizinan.

Tabel. 2.2
Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator	SPM	IKK/ IKU	Target Renstra						Realisasi Capaian				Proyeksi			
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
1	2	3	4	5		6		9		10		11		12		13	
1	Nilai investasi		√	1.50	trilyun n rp	1.55	trilyun rp	1.6	trilyun rp	2.1	trilyun rp	2.2	trilyun rp	1.6	trilyun rp	1.65	trilyun rp
2	Jumlah investor		√	1.785	investor	1.313	investor	3.000	investor	8.777	investor	14.936	investor	3.000	investor	3.250	investor
3	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]			30	%	40	%	40	%	10	%	30	%	40	%	50	%
4	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]			20	%	20	%	20	%	41	%	39,29	%	20	%	25	%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]			82.00	poin	83.00	poin	84.00	poin	86.75	poin	87.50	poin	84.00	poin	84.00	poin
6	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]			8	%	10	%	10	%	10	%	58,42	%	10	%	10	%
7	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]			30	%	30	%	50	%	30	%	30	%	50	%	50	%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk penyelenggaraan tugas dimaksudkan. DPMPTSP Kabupaten Sragen mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

Selain itu tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan mudah, cepat, transparan, terpercaya dan berkualitas. Terkait dengan hal tersebut, isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:

1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Upaya peningkatan penanaman modal dilakukan melalui penerbitan kebijakan di bidang penanaman modal yang meliputi;

- Penetapan Pemberian fasilitas/ insentif di Bidang Penanaman Modal; dan
- Pembuatan Peta Potensi Investasi.

Sasaran program ini adalah meningkatnya dokumen kebijakan penanaman modal yang disusun. Diharapkan dengan kebijakan ini terciptanya rasa aman, nyaman serta tercipta iklim investasi yang baik dan semakin mudah melakukan penanaman modal. Upaya untuk meningkatkan iklim investasi melalui peningkatan daya saing

investasi daerah juga dilakukan melalui kebijakan deregulasi/ penyederhanaan peraturan di bidang investasi, baik menyangkut insentif maupun fasilitas penanaman modal.

2. Promosi Penanaman Modal

Sasaran program ini adalah meningkatnya realisasi kepemilikan investasi bagi pelaku usaha skala menengah besar. Upaya peningkatan investasi melalui promosi investasi dan kerjasama investasi yang dilakukan dengan pihak instansi pemerintah, investor maupun pihak ketiga. Ruang lingkup promosi penanaman modal meliputi;

- Penyusunan strategi promosi penanaman modal
- Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran program ini adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Program ini merupakan upaya peningkatan pelayanan di bidang perizinan penanaman modal dengan mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu. Program Pelayanan Penanaman Modal meliputi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh DPMPTSP. Dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS RBA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Sementara Pemerintah daerah diberikan peluang untuk mengembangkan sistem

pendukung pelaksanaan Sistem OSS RBA sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Melalui OSS RBA pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Dengan demikian penataan kembali regulasi penanaman modal dan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penerbitan perizinan berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik, serta penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi pelaku usaha yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Guna memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. maka keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sangat diperlukan. MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang/jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara/daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Sedangkan ruang lingkup pelayanan penanaman modal ini meliputi;

- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
- c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah pelaksanaan pemantauan, Pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah :

- a. Memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan;
- b. Melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. penggunaan fasilitas fiskal dan non fiskal serta melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan.

Sasaran pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah tercapainya realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ini meliputi kegiatan :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal.
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal

5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pelaksanaan program ini dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pengembangan aplikasi perizinan *online*. yang merupakan aplikasi pendukung OSS. digunakan untuk mendukung penerapan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Dengan pengembangan aplikasi ini, maka seluruh kewenangan bidang perizinan/nonperizinan yang tidak terakomodasi

pada OSS, juga dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan *online*. Dengan penerapan teknologi informasi, maka diharapkan hanya ada satu data dan tidak terjadi tumpang tindih seperti yang sering terjadi.

6. Isu penting lain di tahun 2025 pada Urusan Penanaman Modal adalah
 - a. Belum optimalnya daya saing daerah;
 - b. Belum optimalnya daya tarik realisasi investasi berskala nasional baik PMDN/PMA;
 - c. Belum optimalnya promosi investasi berskala nasional;
 - d. Belum optimalnya pengawalan investasi dan pengawasan penanaman modal.
 - e. Optimalisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang mencakup sektor layanan publik baik pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD maupun swasta.
 - f. Belum optimalnya tata kelola penanaman modal

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub Bab ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu: 1) membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2) penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan 3) penjelasan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025. atau program/kegiatan/subkegiatan yang sesuai namun besarnya berbeda.

Penjelasan pada bagian ini belum dapat disajikan karena hingga penyusunan rencana kerja ini. Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 hanya menyajikan matrik program/kegiatan sedangkan subkegiatan belum ditampilkan secara rinci.

Tabel. 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DPMPPTSP			8.080.275.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DPMPPTSP			8.105.619.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPMPPTSP	Persentase ketercapaian pelayanan umum. kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	6.024.275.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPMPPTSP	Persentase ketercapaian pelayanan umum. kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	6.183.000.000	
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPPTSP	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	3 dokumen	6.000.000	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPPTSP	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	3 dokumen	6.000.000	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.000.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPPTSP	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.875.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPPTSP	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.600.000.000	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25Orang/bl	3.600.000.000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPPTSP	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 laporan	32.822.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPPTSP	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 laporan	61.000.000	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMPPTSP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	16.000.000	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPPTSP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	45.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPPTSP	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	640.953.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPPTSP	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	720.000.000	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPPTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	320.000.000	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	70.000.000	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPPTSP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	115.000.000	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	DPMPPTSP	Jumlah Dokumen Bahan	1 Dokumen	10.000.000	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	110.000.000	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPPTSP	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMPPTSP	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	2 laporan	305.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	2 laporan	510.000.000	
						Pengadaan KENDARAAN Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3 unit	380.000.000	
						Pengadaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	40.000.000	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	1 unit	20.000.000	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28 Unit	70.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	885.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	966.000.000	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	6.000.000	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	450.000.000	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	90.000.000	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	420.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	279.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	320.000.000	

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	60.000.000	
						Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	115.000.000	
						Pemeliharaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	96 Unit	15.000.000	
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	20.000.000	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	60.000.000	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	DPMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	28 unit	50.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun	50%	370.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun	50%	370.000.000	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	1 dokumen	170.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	1 dokumen	150.000.000	
						Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	100.000.000	
						Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha	4 Kegiatan	50.000.000	

	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPPTSP	jumlah penyusunan peta potensi investasi	1 dokumen	200.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPPTSP	jumlah penyusunan peta potensi investasi	2 dokumen	220.000.000	
						Penyusunan Rencana Umum Peananaman Modal	DPMPPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Rencana Umum Peananaman Modal	1 dokumen	120.000.000	
						Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPPTSP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPPTSP	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/ PMDN skala menengah/ besar	20%	480.000.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPPTSP	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar	20%	330.000.000	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPPTSP	jumlah even promosi	2 kali	480.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPPTSP	jumlah even promosi	2 kali	330.000.000	
						Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	DPMPPTSP	Jumlah Perda yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	180.000.000	
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	DPMPPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	150.000.000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan	84 poin	600.000.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan	84 poin	520.000.000	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPPTSP	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	100%	600.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPPTSP	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	100%	520.000.000	
						Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3200 Pelaku usaha	130.000.000	

						Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	500 Kegiatan usaha	230.000.000	
						Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	80 orang	60.000.000	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	150 Kegiatan usaha	100.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	10%	496.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	10%	602.619.000	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	496.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	602.619.000	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Pelaku	20.000.000	
						Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	315 Pelaku	407.834.000	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	150 Kegiatan	174.785.000	

	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik	50%	110.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik	50%	100.000.000	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan	50%	110.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan	50%	100.000.000	
						Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP	jumlah aplikasi Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	100.000.000	
					8.080.275.000					8.105.619.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu, guna mencapai tujuan dan sasaran. Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, dan kalangan akademisi. Deskripsi yang perlu disajikan antara lain: 1) penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; dan 2) penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah. masyarakat dapat mengusulkan melalui proses musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) baik pada tingkat desa/ kelurahan, kecamatan maupun kabupaten. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran strategis perangkat daerah. Namun demikian sejak tahapan penyusunan rencana kerja tahun 2025 disusun, tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

Dengan menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, rencana kerja tahun 2025 sebanyak 6 program, 12 kegiatan dan 33 sub kegiatan.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. penyusunan renja harus menelaah kebijakan dan program prioritas nasional sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah.

Strategi pembangunan nasional tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Namun seiring dengan proses politik Pemilihan Presiden yang sampai saat ini sedang berlangsung, Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) Tahun 2024-2029, belum tersusun. Dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai **"Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan"**.

Enam agenda nasional untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu:

1. Melanjutkan industrialisasi melalui hilirisasi untuk pertumbuhan dan ketahanan ekonomi;
2. Digitalisasi untuk membuat penyebaran informasi menjadi lebih efisien, transparan, dan membantu pemerintah untuk mengurangikorupsi;
3. Menyediakan pendidikan berkualitas tinggi yang terjangkau, sehingga bisa menghasilkan sumber daya manusia yang terampil;
4. Mengembangkan infrastruktur untuk membuat interkoneksi dari orang, barang, dan informasi;

5. Melakukan dekarbonisasi untuk mempercepat net zero emission, sambil menangkap peluang di bisnis ekonomi hijau;
6. Menyeimbangkan semuanya dengan 'adil' menyelesaikan masalah ketidaksetaraan sosial di Indonesia

Sedangkan Konsep Arah Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam rancangan RPJP Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 adalah **“Jawa Tengah Mandiri, Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan”**.

- a. **Mandiri**, Mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan mampu memberi kontribusi pihak lain.
- b. **Maju**, Masyarakat yang berada pada tingkat peradaban yang tinggi dalam penguasaan teknologi.
- c. **Sejahtera**, Suatu kondisi yang menunjukkan Masyarakat di Jawa Tengah dalam keadaan sehat, tercukupi kebutuhan dasarnya.
- d. **Berbudaya**, Masyarakat yang berkarakter kuat, menjaga etika dan norma, mempertahankan kearifan lokal dalam semua sektor.
- e. **Berkelanjutan**, Menjaga kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, keadilan dan tata kelola untuk peningkatan kualitas hidup satu generasi ke generasi berikutnya.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah **“Menuju Kabupaten Sragen mandiri. sejahtera dan berbudaya dengan semangat gotong royong”**. Misi yang ditempuh guna mewujudkan visi tahun 2021-2026 tersebut adalah:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- b. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih. inovatif. efektif. terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi dan ketahanan pangan.
- d. Penanganan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.
- e. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

Pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 Tahap IV (2020-2025). Tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah itu **“Peningkatan Ekonomi melalui peningkatan investasi pemberdayaan UMKM dan daya saing pariwisata”** dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagai berikut.;

Dalam rangka merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 perlu serangkaian tahapan serta memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yang berlaku dan telah tersedia, yaitu:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- 2) Arah dan prioritas kebijakan pembangunan Nasional tahun 2025;
- 3) Arah dan prioritas kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
- 5) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui kegiatan tahunan. Rencana strategis memuat target indikator kinerja tingkat sasaran strategis untuk masing-masing perangkat daerah. Rencana Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukkan kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Ukuran keberhasilan dinyatakan dalam angka capaian

realisasi atas indikator-indikator kinerja yang berorientasi indikator kinerja tujuan.

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/ rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2025, yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
DPMPTSP Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Tujuan Strategis : Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal (trilyun rupiah)	1.65
1.1	Sasaran Strategis: Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/PMDN (investor)	3.000
1.2	Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (predikat)	BB (70.50)
18.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (%)	100
18.2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun (%)	50

18.3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/ besar (%)	25
18.4	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan (poin)	84.00
18.5	Program Pengendalian dan Pelaksanaan	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM (%)	10
18.6	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik (%)	50

3.3. Program/ Kegiatan/ Subkegiatan

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program/kegiatan/subkegiatan di tahun 2025 antara lain;

Tabel 3.2
Program/Kegiatan/Subkegiatan
DPMPTSP Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Pengawasan Penanaman Modal
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan. Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Sragen tahun 2025 dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran renja, visi dan misi Kabupaten Sragen yang tertuang dalam RKPD. Program kerja utama DPMPTSP Kabupaten Sragen sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Sragen adalah:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
6. Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab DPMPTSP dalam evaluasi RKPD dan LKPJ. Dalam Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2025 terdapat 6 program, 12 kegiatan dan 33 subkegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh program/ kegiatan/ subkegiatan yang tertuang dalam rencana kerja yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen serta sumber dana lainnya.

4.1. Rencana Program Strategis Daerah Tahun 2025

Program strategis Kabupaten Sragen tahun 2025 merupakan bagian program unggulan Bupati Sragen dalam periode lima tahun ke depan yakni tahun 2021-2026, yang terkait dengan tugas fungsi DPMPTSP Kabupaten Sragen di antaranya;

1. Pengembangan UMKM dengan anggaran mencapai 10 milyar per tahun.

Rencana program pengembangan UMKM yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkannya diantaranya melalui

- a. Program Promosi penanaman modal.

Indikator kinerja program ini yaitu Persentase realisasi kepemilikan investasi skala besar/ menengah. Program ini dilaksanakan dengan mengikutsertakan pelaku umkm pada kegiatan pameran investasi yang dilaksanakan DPMPTSP.

- b. Program Pelayanan penanaman modal.

Indikator kinerja program ini yaitu nilai IKM bidang perizinan dan nonperizinan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi dan pembinaan bidang perizinan pelaku umkm.

2. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik dan Pembangunan Pemda Terpadu.

Mal Pelayanan Publik yang ada saat telah berjalan dengan baik, yang telah menyelenggarakan layanan publik dari berbagai instansi baik instansi pemerintah pusat/ BUMN maupun perangkat daerah kabupaten dan BUMD. Sebanyak 41 gerai layanan dari Kementerian/ Lembaga maupun instansi pemerintah pusat/ daerah/ BUMN/ BUMD telah menjalankan layanan publik di Mal Pelayanan Publik. Program yang mendukung Optimisasi Mal Publik adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

4.2. Kerangka Pendanaan Tahun 2025

Berdasarkan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 pagu anggaran Dinas Penanaman Modal sebesar Rp. 7.018.918.719 (termasuk kegiatan yang dibiayai dari DAK Non Fisik) yang terdiri dari Rp. 3.575.422.221 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sedangkan

sisanya sebesar Rp. 3.244.523.898 untuk belanja operasi. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagai berikut;

Tabel 4.2
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Bidang/Progra m/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						7.018.918.719							6.880.100.000	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.018.918.719							6.880.100.000	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						7.018.918.719							6.880.100.000	
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	5.629.406.219						100 %	5.840.100.000	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	-			3 dokumen	5.763.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-	-	6.600.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2.917.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		3.200.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.846.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		3.400.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	-			12 bulan	3.575.422.221			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-	-	3.600.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	3.575.422.221	Kab. Sragen , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		3.600.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			2 laporan	64.528.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-	-	64.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	19.528.000	Kab. Sragen , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan	-		0.000	16.50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

												layanan Investasi yang berkualitas					
	2.18.01. 2.05.00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan</i>				30 Orang	45.000.000	Kab. Sragen , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Peningka tan kapasitas p erekonomia n yang berdaya saing dan b erkelanjuta n berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		0.000	48.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah</i>	-			12 bulan	520.899.600			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Peningka tan kapasitas p erekonomia n yang berdaya saing dan b erkelanjuta n berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-	-	673.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01. 2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran- gan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	39.936.000	Kab. Sragen , Semua Kecam- atan, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Peningka tan kapasitas p erekonomia n yang berdaya saing dan b erkelanjuta n berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		42.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01. 2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	194.608.600	Kab. Sragen , Semua Kecam- atan, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Peningka tan kapasitas p erekonomia n yang berdaya saing dan b erkelanjuta n berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		280.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01. 2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	70.415.000	Kab. Sragen , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		74.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	89.290.000	Kab. Sragen , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	7.000.000	Kab. Sragen , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan	-		12.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

												layanan Investasi yang berkualitas				
	2.18.01. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	100.000.000	Kab. Sragen , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Peningka tan kapasitas p erekonomia n yang berdaya saing dan b erkelanjuta n berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		125.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01. 2.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokume n	19.650.000	Kab. Sragen , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Peningka tan kapasitas p erekonomia n yang berdaya saing dan b erkelanjuta n berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		30.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>jumlah laporan pengadaan barang milik daerah</i>	-			2 laporan	96.947.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-	-	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.00.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	35.000.000	Kab. Sragen , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.00.05	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				4 Unit	26.742.000	Kab. Sragen , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan	-		0.000 50.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

												layanan Investasi yang berkualitas						
	2.18.01. 2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit		0	Kab. Sragen , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Peningka tan kapasitas p erekonomia n yang berdaya saing dan b erkelanjuta n berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		0.000	20.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01. 2.07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				28 Unit		35.205.000	Kab. Sragen , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Peningka tan kapasitas p erekonomia n yang berdaya saing dan b erkelanjuta n berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-			70.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			12 bulan	1.008.121.398			Memperkuat Stabilitas Polhukhan k am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-	-	976.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.00.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	6.000.000	Kab. Srag en, Sem ua Kcamatan, Sem ua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhan k am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		6.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	507.925.022	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		450.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	77.161.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		90.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	417.035.376	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhan dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		430.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah</i>	-			2 laporan	357.725.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhan dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-	-	320.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				15 Unit	230.520.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		175.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				96 Unit	13.582.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														

			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit	18.260.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		000.000	20.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi</i>				1 Unit	49.765.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		60.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															

			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir Rehabilitasi</i>				28 Unit	45.598.000	Kab. Sragen, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhan k am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan n berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2,	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	<i>Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun</i>	50 %			50 %	100.000.000						50 %	100.000.000	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>jumlah dokumen kebijakan penanaman modal</i>	-			1 dokumen	100.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhan k am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan n berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-	-	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														

			<i>Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>				1 Dokumen	100.000.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhan k am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3,	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/ PMDN skala menengah/ besar	25 %			25 %	137.534.000						25 %	150.000.000	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>jumlah even promosi</i>	-			2 kali	137.534.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhan k am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-	-	150.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.00.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	137.534.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhan dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		150.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4,	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan</i>	84 Poin			84 Poin	482.359.500						84 Poin	510.000.000	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan</i>	-			100 %	482.359.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhan dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-	-	510.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														

			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota				150 Dokumen	90.000.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.00.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				3200 Pelaku Usaha	119.992.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		130.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.00.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														

			<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				80 Pelaku Usaha	45.000.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>				500 Kegiatan Usaha	227.367.500	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		230.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5,	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	10 %			10 %	614.619.000						10 %	180.000.000	

	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal</i>	-			100 %	614.619.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhan k am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-	-	180.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.00.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>				315 Pelaku Usaha	432.619.000	Kab. Sragen, Semarang, Kecamatan, Semarang/Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITAS PENANAMAN MODAL	Memperkuat Stabilitas Polhukhan k am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.00.06	Pengawasan Penanaman Modal														

			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>				150 Kegiatan Usaha	182.000.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	Memperkuat Stabilitas Polhukhan dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		180.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6,	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik	50 %			50 %	55.000.000						50 %	100.000.000	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase penyediaan data informasi perizinan/non perizinan</i>	-			50 %	55.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhan dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-	-	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														

			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>				1 Dokumen	55.000.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H							7.018.918.719							6.880.100.000	

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) ini disusun berisikan program/ kegiatan/ subkegiatan sebagai pedoman rencana kinerja tahun 2025. Rencana Kerja ini disusun dengan menyelaraskan target dan indikator kinerja yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2021-2026.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan;

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja SKPD.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama satu tahun yang bersifat indikatif, sehingga apabila terjadi kekurangan dana, maka dilakukan penyesuaian. Apabila anggaran yang tersedia tidak mencukupi, maka penyesuaian dilakukan atas target kinerja dan diupayakan tetap mendukung pencapaian target kinerja dalam mewujudkan tujuan.

Besar harapan kami agar dokumen renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah daerah. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak kami harapkan demi perbaikan penyusunan rencana kerja ke depan.

Demikian Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2025 disusun dengan harapan semoga segala yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sragen, Juni 2024



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19791225 199810 1 001